



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 - 2018



BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN

2017



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.04 TELEPON (0746) 21288 FAX (0746) 322506
BANGKO

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 558 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018**

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 Dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 Tanggal 30 Desember 2016, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 Dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Bidang, Kasubid dan Kasubag di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin agar menjadikan Perubahan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 30 Desember 2016

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MERANGIN**



H. DESI DARMASTIAS, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680918 199503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko;
4. Arsip

KATA PENGANTAR

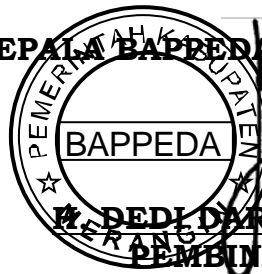
Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah SWT sehingga penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Merangin 2014-2018 dapat terlaksana. Dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran dan kinerja pembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Bappeda Kabupaten Merangin dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD Bappeda Kabupaten Merangin memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran Target Indikator Kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Demikian Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Merangin 2014-2018 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN



DEDI DARMANTIAS, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680918 199503 1 001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	10
	2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
	2.2 Sumber Daya Bappeda.....	14
	2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda	39
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	41
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	44
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	51
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	53
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	55
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	61
	4.1 Visi dan Misi BAPPEDA	61
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda.....	63
	4.3 Penetapan Strategi dan Kebijakan.....	66
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	68

BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2014-2018	84
	6.1 Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Merangin....	84
	6.2 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Merangin.....	85
BAB VII	PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Bappeda Tahun 2016 (Menurut Jabatan dan Eselonering)	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Bappeda Tahun 2016 (Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan)	15
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Bappeda Tahun 2016 (Menurut Jabatan dan Tingkat Penjenjangan)	16
Tabel 2.4	Diklat Struktural yang Telah diikuti Pegawai Bappeda	17
Tabel 2.5	Data Aset Tanah	18
Tabel 2.6	Data Aset Peralatan dan Mesin	19
Tabel 2.7	Perkembangan Anggaran Bappeda Setelah Perubahan Tahun 2008 – 2016	39
Tabel 2.8	Realisasi dan Peningkatan Anggaran Bappeda Tahun 2008 – 2016	39
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Bappeda 2008 – 2013	40
Tabel 3.1	Misi 1 Kabupaten Merangin	48
Tabel 3.2	Misi 2 Kabupaten Merangin	49
Tabel 3.3	Misi 3 Kabupaten Merangin	49
Tabel 3.4	Misi 4 Kabupaten Merangin	50
Tabel 3.5	Misi 5 Kabupaten Merangin	50
Tabel 3.6	Misi 6 Kabupaten Merangin	51
Tabel 3.7	Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal	56
Tabel 3.8	Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	57
Tabel 3.9	Formulasi Strategi SWOT	59
Tabel 4.1	Tujuan Bappeda untuk mencapai Visi dan Misi	63
Tabel 4.2	Sasaran Bappeda untuk mencapai Tujuan	64
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	64
Tabel 4.4	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bappeda	65
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bappeda 2014 – 2018	67
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014 – 2018 Kabupaten Merangin	84
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Bappeda 2014 -2018	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Merangin	13
----------	------------------------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah diberikan amanat untuk menyusun Dokumen Rencana Jangka Panjang (RPJP), dokumen Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP). Sementara Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) diamanatkan untuk menyusun Dokumen Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis/Renstra) dan Rencana Tahunan (Renja).

Rencana Jangka Menengah OPD adalah dokumen rencana strategis untuk mencapai visi dan misi OPD yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Rencana strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, rencana strategis

tersebut minimal harus mencakup kebijakan strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.

Proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak dalam pembuatan Rencana Strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan rencana strategis secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Nomor 421 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur

Organisasi yang baru. Selain itu Pemerintah Kabupaten Meranginjuga melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra BAPPEDA Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Merangin merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2014-2018 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi

- Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
 30. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 Dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 61);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah strategis lima tahunan dengan mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan Capaian Program RPJMD yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Merangin dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Kabupaten Merangin.
3. Memudahkan Bappeda Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Merangin untuk memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu 2 tahun kedepan.
5. Untuk mengukur kinerja Bappeda Kabupaten Merangin dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra SKPD, maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UMUM, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi serta data pendukung Bappeda Kabupaten Merangin dengan maksud mengetahui keadaan Bappeda Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Bappeda Kabupaten Merangin lima tahun kedepan

-
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Bappeda serta TUPOKSI Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rumusan tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaku aktivitas pada Bappeda Kabupaten Merangin.
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Bab ini menguraikan rumusan Visi dan Misi serta kebijakan strategis Bappeda Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Merangin.
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF, Bab ini berisikan rencana program kegiatan Bappeda Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Merangin.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Merangin

Pembentukan Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan dan pemekaran wilayah di lingkup Propinsi Jambi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sehingga dalam hal ini Bappeda yang merupakan leading sector perencanaan pembangunan di daerah, secara bertahap terus melakukan pembenahan dalam upaya mempersiapkan dan menyusun rencana-rencana pembangunan daerah secara realistis dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen, baik lintas sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat.

A. Kedudukan Bappeda Kabupaten Merangin

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Bappeda Kabupaten Merangin

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, Bappeda

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Tugas Pembantuan.

C. Fungsi Bappeda Kabupaten Merangin

- 1) Melaksanakan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah;
- 2) Melaksanakan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan tata ruang wilayah daerah;
- 4) Melaksanakan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 5) Penyusunan Kebijakan Teknis Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 6) Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 8) Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 9) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

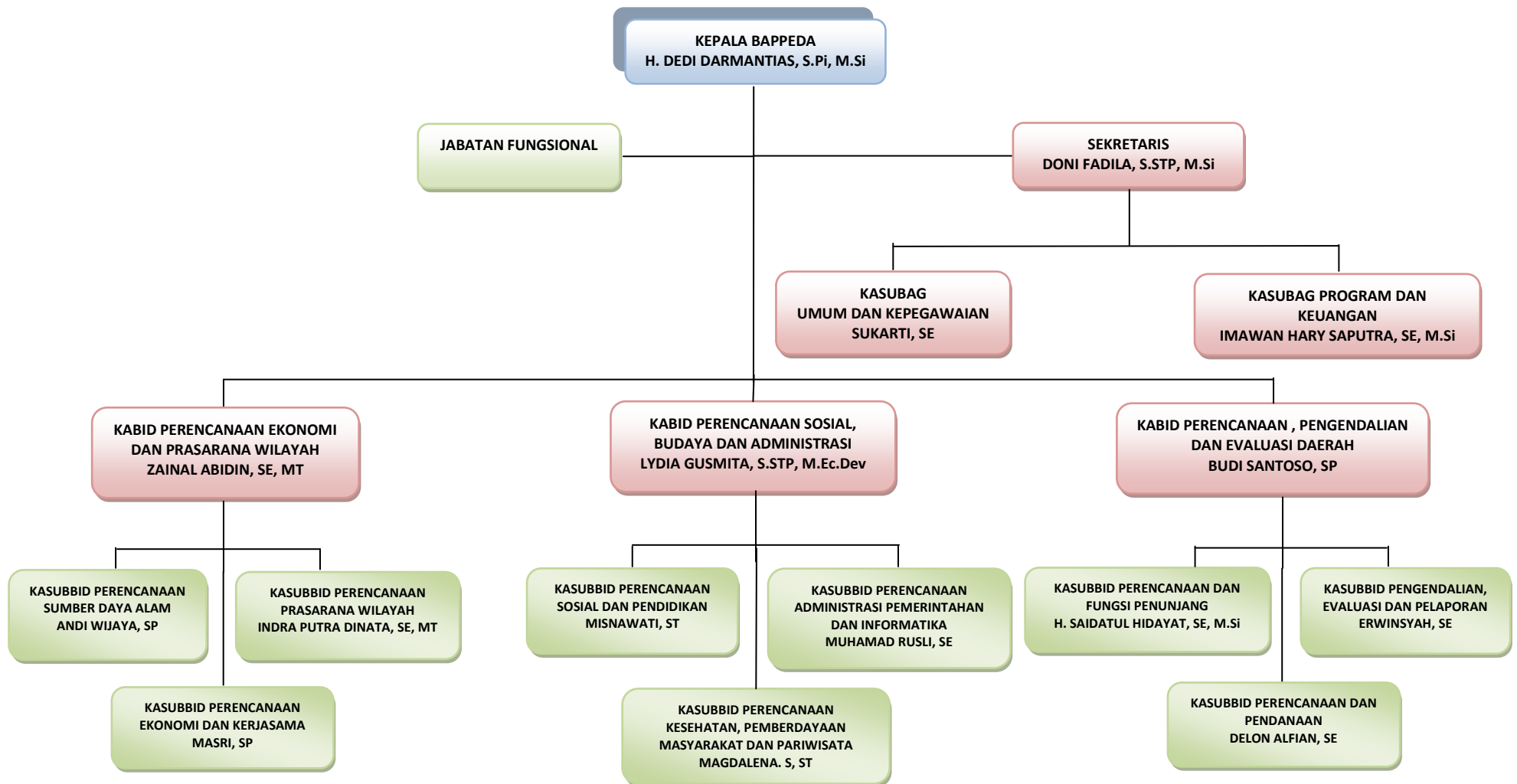
D. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Merangin

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan, Terdiri dari dua Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pasarana Wilayah, Terdiri dari tiga Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam
 - b. Sub Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah
 - c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Kerjasama
4. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan, Terdiri dari tiga Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Pendidikan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Perencanaan Administrasi Pemerintahan dan Informatika
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Terdiri dari tiga Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bidang Perencanaan dan Fungsi Penunjang
6. Jabatan Fungsional

Untuk uraian lebih rinci struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar berikut ini:

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN



2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Merangin

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. Sebagai institusi perencana pembangunan di daerah, untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan bermacam aparaturnya dengan disiplin ilmu yang berbeda. Jumlah pegawai di Bappeda per Desember 2016 berjumlah 49 personil PNS, terdiri dari latar pendidikan Strata Dua (S2) 13 (Tiga belas) orang, Strata Satu (S1) 24 (dua empat) orang, Sarjana Muda 1 (satu) orang dan SLTA 10 (sepuluh) orang. Selain itu, untuk membantu kinerja Bappeda juga didukung oleh pegawai honor daerah (Honda) yang berjumlah 34 (tiga Puluh Empat) Personil. Gambaran keadaan pegawai dan perkembangannya selama Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1
JUMLAH PEGAWAI BAPPEDA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016
(MENURUT JABATAN DAN ESELONERING)

NO	UNIT KERJA	PNS (Eselon/Orang)					JML	HONDA
		II	IIIA	IIIB	IV	STAF		
1	Kepala Badan	1	-	-	-	-	1	-
2	Sekretariat	-	1	-	2	16	19	17
3	Bidang Litbangdal	-	-	1	2	4	7	4
4	Bidang Fispra	-	-	1	2	5	8	5
5	Bidang Ekonomi	-	-	1	2	6	9	3
6	Bidang Sosbud	-	-	1	2	4	7	4
Jumlah		1	1	4	10	35	51	33

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Merangin Tahun 2016

Sedangkan jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Merangin menurut klasifikasi pendidikan, pangkat dan golongannya dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.2.
JUMLAH PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2016
(MENURUT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN)

No	Pendidikan	Pangkat / Golongan (Orang)										JLH	
		II				III				IV			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	3	3	1	-	2	2	-	-	-	-	-	11
4	SARJANA MUDA (D3)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	STRATA 1 (S1)	-	-	-	-	7	12	10	3	-	1	-	33
6	STRATA 2 (S2)	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	6
7	STRATA 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J u m l a h	3	3	1	1	9	14	11	4	3	2	-	51

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Merangin Tahun 2016

Untuk memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural yang ada di Bappeda Kabupaten Merangin, maka kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan maupun penjenjangan dapat diangkat pada jabatan struktural. Persyaratan penjenjangan diperoleh aparatur melalui Pendidikan dan Latihan Pimpinan (Diklatpim). Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah mengikuti Diklat Pim sampai Tahun 2016 menurut jabatan dan tingkat penjenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.
JUMLAH PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2016
MENURUT JABATAN DAN TINGKAT PENJENJANGAN

No	Jabatan	Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan			Keterangan
		PIM II	PIM III	PIM IV	
1	Kepala Badan	-	1	1	1 orang
2	Sekretaris	-	1	1	1 orang
2	Kabid	-	3	4	4 orang
3	Kasubag/ Kasi	-	-	4	4 orang
4	Staf	-	-	1	1 orang
J u m l a h			5	10	11 orang

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Kab. Merangin Tahun 2016

Upaya pengembangan sumberdaya manusia di Bappeda Kab. Merangin terus dilakukan setiap tahunnya melalui pendidikan dan latihan. Selain diklat struktural, Bappeda juga mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti diklat-diklat fungsional. Untuk lebih jelasnya tabel berikut memperlihatkan data aparatur Bappeda yang telah mengikuti Diklat Struktural.

**Tabel 2.4.
DIKLAT STRUKTURAL YANG TELAH DIKUTI PEGAWAI BAPPEDA
KABUPATEN MERANGIN**

No	Nama	Jenis Diklat Struktural	Tgl Pelatihan	Tempat	Pelaksana
1	H. Dedi Darmantias, S.Pi, M.Si	Adum		Jambi	Bandiklat Prov. Jambi
		Diklat PIM Tk.III		Bukit Tinggi	Pusdiklat Reg. Bukit Tinggi
2	Doni Fadila, S.STP., M.Si	Adum	2000	Bandung	STPDN
		Diklat PIM III	2016	Bukit Tinggi	Pusdiklat Reg. Bukit Tinggi
3	Ir. Mulyo Handoyo	Adum	22 - 3 - 1999	Jambi	Bandiklat Prov. Jambi
		Diklat Pim III	21 - 7 - 2004	Bukit Tinggi	Pusdiklat Reg. Bukit Tinggi
4	Drs. Alamsyah, ME	Adum	13-04-1996	Jambi	Bandiklat Prov. Jambi
		Diklat Pim III	07-09-2005	Jambi	Bandiklat Prov. Jambi
5	Nana Supriyatna, SP	Diklat Pim IV	27-06-2002	Bangko	Pemkab Merangin
		Diklat Pim III	2016	Jambi	Bandiklat Prov. Jambi
6	Lydia Gusmalita, S.STP., M.Ec.Dev	Diklat Pim IV	2010	Bangko	Pemkab Merangin
7	Misnawati, ST	Diklat Pim IV	06-08-2007	Bangko	Pemkab Merangin
8	H. Saidatul Hidayat, SE, M.Si	Diklat Pim IV		Bangko	Pemkab Merangin
9	Rusli, S.Pd, M.Si	Diklat Pim IV		Bangko	Pemkab Merangin
10	Muhammad Rusli, SE	Diklat Pim IV	2013	Bangko	Pemda Merangin
11	Imawan Hary Saputra, SE	Diklat Pim IV	2013	Bangko	Pemda Merangin

Keberhasilan operasionalisasi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak akan terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana (aset) yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang sangat penting guna mewujudkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Bappeda Kabupaten Merangin. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya lahan, gedung tempat kerja, sarana kerja, sarana mobilitas dan sarana pendukung lainnya. Gambaran sarana dan prasarana atau aset yang ada di Bappeda Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut;

**Tabel 2.5
DATA ASET TANAH**

NO	URAIAN	LUAS (M ²)	LOKASI
1	Kantor Bappeda Kabupaten Merangin	2.652 M ²	Jl. Jend. Sudirman No.04 Bangko

Aset sarana tempat kerja tersebut di atas, terdiri dari Kantor Bappeda didirikan tahun 1996 seluas 1,482 M² yang 10 (sepuluh) Tahun kemudian direnovasi beserta Ruang kerja bendahara 36 m², gedung arsip 47 m², ruang parkir seluas 47 m², Ruang kerja Tata Usaha seluas 195 m². Tahun 2008 dilaksanakan pula kegiatan pembangunan Mushola dengan konstruksi sederhana yang hanya 1 lantai guna memenuhi kegiatan peribadatan. Kemudian pada Tahun 2009, dilakukan pembangunan sarana prasarana perkantoran yakni Pembangunan Gedung Arsip 14,14 M² dan Tempat Genset seluas 30 M². Data perolehan aset selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6
DATA ASET PERALATAN DAN MESIN**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	1996
2	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	1996
3	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	1996
4	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	1997
5	Meja Rapat	Lokal	1997
6	Meja Rapat	Lokal	1997
7	Meja Rapat	Lokal	1997
8	Meja Bundar	Lokal	1997
9	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	1998
10	Kendaraan Roda 2 Bappeda	YamahaT.105E	1998
11	Filling Kabinet	Mustang / Lin	1999
12	Filling Kabinet	Mustang / Lin	1999
13	Filling Kabinet	Mustang / Lin	1999
14	Kendaraan Roda 4 BAPPEDA	Toyota	2001
15	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2001
16	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2001
17	Lemari Buku	Lokal	2001
18	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2002
19	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2002
20	Rak TV		2002
21	Kursi Putar	National	2002
22	Kursi Putar	National	2002
23	Kursi Putar	National	2002
24	Meja Kerja Biro	Lokal	2002

25	AC		2002
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
26	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2003
27	PC Unit		2003
28	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2004
29	Kursi Tamu	Chitose	2004
30	Meja Komputer	Lokal	2004
31	Meja dan Kursi	Chitose	2004
32	AC	LG	2004
33	AC	LG	2004
34	AC	LG	2004
35	AC	LG	2004
36	AC	LG	2004
37	AC	LG	2004
38	AC	LG	2004
39	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2005
40	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2005
41	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2005
42	Kursi Kerja Biro	Koblen	2005
43	AC	National	2005
44	UPS	Sun	2005
45	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2006
46	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2006
47	Snake Cable	Boway	2006
48	Lemari Buku	Koblen	2006
49	Meja Rapat	Lokal	2006

50	Meja Rapat	Lokal	2006
----	------------	-------	------

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
51	Meja Rapat	Lokal	2006
52	Meja Rapat	Lokal	2006
53	Meja Rapat	Lokal	2006
54	Meja Rapat	Lokal	2006
55	Meja Rapat	Lokal	2006
56	Meja Rapat	Lokal	2006
57	Meja Rapat	Lokal	2006
58	Meja Rapat	Lokal	2006
59	Meja Rapat	Lokal	2006
60	Meja Rapat	Lokal	2006
61	Meja Rapat	Lokal	2006
62	Meja Rapat	Lokal	2006
63	Meja Rapat	Lokal	2006
64	Meja Rapat	Lokal	2006
65	Meja Rapat	Lokal	2006
66	Kursi Tamu	Koblen	2006
67	Meja Kerja Biro	Koblen	2006
68	Meja Kerja Biro	Koblen	2006
69	Meja Bufet	Lokal	2006
70	Meja Bufet	Lokal	2006
71	AC	Changhong	2006
72	AC	Changhong	2006
73	AC	Changhong	2006
74	AC	Changhong	2006

75	AC	Changhong	2006
76	AC	Changhong	2006
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
77	AC	Changhong	2006
78	AC	Changhong	2006
79	Equalizer	Boway	2006
80	Microphone	Boway	2006
81	Microphone	Boway	2006
82	Microphone	Boway	2006
83	Microphone	Boway	2006
84	Karpet		2006
85	Advanced Hybrid System	Panasonic	2006
86	Mixer		2006
87	Komputer PC	Acer	2006
88	Komputer PC	Acer	2006
89	LCD	NEC	2006
90	LCD	NEC	2006
91	Scren LCD		2006
92	Printer Laser Jet	HP	2006
93	Meja Staf	Lokal	2006
94	Meja Staf	Lokal	2006
95	Meja Staf	Lokal	2006
96	Meja Staf	Lokal	2006
97	Vertical Blind	Lokal	2006
98	Vertical Blind	Lokal	2006
99	Vertical Blind	Lokal	2006
100	Vertical Blind	Lokal	2006

101	Vertical Blind	Lokal	2006
102	Vertical Blind	Lokal	2006
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
103	Vertical Blind	Lokal	2006
104	Vertical Blind	Lokal	2006
105	Vertical Blind	Lokal	2006
106	Vertical Blind	Lokal	2006
107	Vertical Blind	Lokal	2006
108	Vertical Blind	Lokal	2006
109	Vertical Blind	Lokal	2006
110	Vertical Blind	Lokal	2006
111	Vertical Blind	Lokal	2006
112	Vertical Blind	Lokal	2006
113	Vertical Blind	Lokal	2006
114	Speker 15"	Boway	2006
115	Speker 15"	Boway	2006
116	PowerAmplifier	Boway	2006
117	Stand Mixer	Boway	2006
118	Swiching	Boway	2006
119	Accesoris Sound	Boway	2006
120	Mix Comperence	Bosch	2006
121	Mix Comperence	Bosch	2006
122	Mix Comperence	Bosch	2006
123	Mix Comperence	Bosch	2006
124	Mix Comperence	Bosch	2006
125	Mix Comperence	Bosch	2006
126	Mix Comperence	Bosch	2006

127	Mix Comperence	Bosch	2006
128	Mix Comperence	Bosch	2006
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
129	Mix Comperence	Bosch	2006
130	Mix Comperence	Bosch	2006
131	Mix Comperence	Bosch	2006
132	Mix Comperence	Bosch	2006
133	Mix Comperence	Bosch	2006
134	Mix Comperence	Bosch	2006
135	Mix Comperence	Bosch	2006
136	Mix Comperence	Bosch	2006
137	Mix Comperence	Bosch	2006
138	Mix Comperence	Bosch	2006
139	Mix Comperence	Bosch	2006
140	Mix Comperence	Bosch	2006
141	Mix Comperence	Bosch	2006
142	Mix Comperence	Bosch	2006
143	Mix Comperence	Bosch	2006
144	Mix Comperence	Bosch	2006
145	Mix Comperence	Bosch	2006
146	Kendaraan Dinas Roda Empat Setda	Daihatsu	2007
147	Mesin Ketik Elektronik	Express	2007
148	Lemari/Rak Arsip	Lokal	2007
149	Lemari/Rak Arsip	Lokal	2007
150	Mesin Fotocopy	CanonNP6545	2007
151	Meja Rapat		2007

152	Meja Rapat		2007
153	Meja Rapat		2007
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
154	Meja Rapat		2007
155	Meja Rapat		2007
156	Meja Rapat		2007
157	Meja Rapat		2007
158	Meja Rapat		2007
159	Meja Rapat		2007
160	Meja Kerja 1/2 Biro	Koblen	2007
161	Meja Kerja 1/2 Biro	Koblen	2007
162	Meja Kerja 1/2 Biro	Koblen	2007
163	Meja Kerja 1/2 Biro	Koblen	2007
164	Merk Inventaris		2007
165	Bingkai		2007
166	Meja Kerja		2007
167	Meja Kerja		2007
168	Kursi Kerja	Chitose	2007
169	Kursi Kerja	Chitose	2007
170	Kursi Kerja	Chitose	2007
171	Kursi Kerja	Chitose	2007
172	Kursi Kerja	Chitose	2007
173	Interior Ruang Aula		2007
174	Pintu Kaca Aluminium	Lokal	2007
175	Vertikal Blind		2007
176	Pintu Utaman Ruang Aula	Lokal	2007
177	Pintu Utaman Ruang Aula	Lokal	2007

178	Tangga Aluminium	Toyo	2007
179	Karpet		2007
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
180	Generator Set		2007
181	Generator Set		2007
182	Tabung Pemadam	Solingen	2007
183	PC Unit	Lenovo	2007
184	PC Unit	Lenovo	2007
185	Komputer PC	Lenovo	2007
186	Komputer PC	Lenovo	2007
187	Laptop	Lenovo	2007
188	Partisi Ruang	Lokal	2007
189	Meja Buffet/Lemari	Lokal	2007
190	Mesin Tik Elektrik		2008
191	Rak Arsip/Almari Arsip	Unit	2008
192	Rak Arsip/Almari Arsip	Unit	2008
193	Merk inventaris		2008
194	Meja Rapat		2008
195	Meja Rapat		2008
196	Meja kerja		2008
197	Meja kerja		2008
198	Meja kerja		2008
199	Meja kerja		2008
200	AC 1,5 PK		2008
201	Karpet		2008
202	GPS		2008
203	Mic dan kelengkapannya		2008

204	Tabung Pemadam		2008
205	Komputer mainframe/server		2008
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
206	Note Book		2008
207	UPS		2008
208	UPS		2008
209	UPS		2008
210	Kendaraan Roda 4 Bappeda	Mitsubishi	2009
211	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2009
212	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Mega Pro	2009
213	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2009
214	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2009
215	Kendaraan Roda 2 Bappeda	Honda	2009
216	Rak besi		2009
217	Rak besi		2009
218	Filling Kabinet		2009
219	Lemari Makan		2009
220	Lemari		2009
221	Lemari		2009
222	Lemari		2009
223	Lemari		2009
224	Kaca Jendela dan Bingkai Aluminium		2009
225	Meja Biro dan Meja 1/2 Biro		2009
226	Meja Biro dan Meja 1/2 Biro		2009
227	Meja Biro dan Meja 1/2 Biro		2009
228	Meja Kerja		2009

229	AC		2009
230	Rak Piring dan Kelengkapannya		2009
231	Genset		2009
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
232	Mesin Rumput		2009
233	GPS		2009
234	Baliho		2009
235	Peralatan Jaringan Komputer		2009
236	Komputer PC		2009
237	Software		2009
238	Note Book		2009
240	Note Book		2009
241	UPS		2009
242	UPS		2009
243	UPS		2009
244	Kursi Kerja		2009
245	Kursi Kerja		2009
246	Kursi Kerja		2009
247	Kamera Digital		2009
248	Lemari Arsip		2010
249	Meubeleur		2010
250	Meubeleur		2010
251	Meubeleur		2010
252	Meubeleur		2010
253	Meubeleur		2010
254	Vacum Cleaner	Lux luna	2010
255	AC	LG	2010

256	Sound sistem dan kelengkapannya	Martin logan	2010
257	Handycam		2010
258	GPS	Oregan 550 i	2010
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
259	GPS	Oregan 550 i	2010
260	GPS		2010
261	Komputer PC	Aser	2010
262	Komputer PC	Sim-X	2010
263	Komputer PC	Sim-X	2010
264	Komputer PC	Sim-X	2010
265	Komputer Note Book	Thosiba	2010
266	Komputer Note Book		2010
267	Harddisk External	Adata nobyli	2010
268	Harddisk External	Adata obili	2010
269	Harddisk External		2010
270	Harddisk External		2010
271	UPS/Stabilizer	Prolink	2010
272	UPS/Stabilizer	Prolink	2010
273	Kamera digital		2010
274	Kamera digital		2010
275	Kendaraan Roda Dua, Bappeda	Kawasaki	2011
276	Lemari Arsip	Expo	2011
277	Ac Standing	LG Letcool	2011
278	Ac Standing	LG Letcool	2011
279	Ac Standing	LG Letcool	2011
280	Ac Standing	LG Standing	2011

281	Televisi Berwarna	Sharp LCD	2011
282	GPS	Garmin GPSmAp78s	2011
283	Komputer PC	Lenovo	2011

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
284	Komputer PC	Lenovo	2011
285	Note Book	Toshiba	2011
286	Note Book	Toshiba	2011
287	Note Book	HP	2011
288	Plotter	HP	2011
289	Hardisk Eksternal	Samsung	2011
290	Printer	CanonIP3680	2011
291	Kamera Digital	Sony Cyber	2011
292	Camera Digital		2011
293	Kamera Digital	Lumix FZ40	2011
294	Filling Kabinet	A-DZG	2012
295	Filling Kabinet	A-DZG	2012
296	Filling Kabinet	A-DZG	2012
297	Filling Kabinet	A-DZG	2012
298	Filling Kabinet	A-DZG	2012
299	Lemari	Active	2012
300	Kursi Putar		2012
301	Kursi Kerja		2012
302	Kursi Kerja		2012
303	Kursi Kerja		2012

304	Wireless	Shure	2012
305	Mesin Rumput	Tanaka Pro338	2012
306	GPS	Garmin	2012
307	Interior Ruangan		2012
308	Komputer PC	HP	2012
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
309	Note Book	Toshiba	2012
310	Stand Ploter	HP Invent	2012
311	Kelengkapan Eksternal Hardisk	Axioo	2012
312	Kelengkapan Eksternal Hardisk	Axioo	2012
313	Kelengkapan Eksternal Hardisk	Axioo	2012
314	Kelengkapan Eksternal Hardisk	Axioo	2012
315	Kelengkapan Eksternal Hardisk	Axioo	2012
316	Kelengkapan Eksternal Hardisk	Axioo	2012
317	Komputer	Samsung	2012
318	Printer LQ Dot Matrik	LQ Dot Matrik	2012
319	Printer LQ Dot Matrik	LQ Dot Matrik	2012
320	Proyektor		2012
321	STABILIZER	OKI	2013
322	MEJA 1/2 BIRO	EXPO	2013
323	MEJA 1/2 BIRO	EXPO	2013
324	MEJA 1/2 BIRO	EXPO	2013
325	MEJA 1/2 BIRO	EXPO	2013
326	KURSI TAMU	NEWOOD	2013
327	ALMARI ARSIP	EXPO	2013
328	ALMARI ARSIP	EXPO	2013
329	ALMARI ARSIP	EXPO	2013

330	ALMARI ARSIP	EXPO	2013
331	AC	SHARP	2013
332	AC	SHARP	2013
333	GPS	ULITE	2013
334	GPS	ULITE	2013
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
335	PROYEKTOR	BENQ	2013
336	PROYEKTOR	BENQ	2013
337	AC STANDING	Green	2013
338	TV WARNA	SAMSUNG	2013
339	MICROPHONE WIRELESS	Shure	2013
340	MICROPHONE WIRELESS	Shure	2013
341	BENDERA KABUPATEN MERANGIN	Lokal	2013
342	KOMPUTER PC	LENOVO	2013
343	KOMPUTER PC	LENOVO	2013
344	LAPTOP	VAIO	2013
345	LAPTOP	VAIO	2013
346	LAPTOP	VAIO	2013
347	LAPTOP	VAIO	2013
348	LAPTOP	VAIO	2013
349	LAPTOP	VAIO	2013
350	PRINTER	CANON MX377	2013
351	PRINTER	CANON MX377	2013
352	PRINTER	CANON MX377	2013
353	PRINTER	CANON MX377	2013
354	PRINTER	CANON MX377	2013

355	PRINTER	CANON MX377	2013
356	PRINTER	CANON MX377	2013
357	PRINTER	CANON MX377	2013
358	PRINTER LQ	EPSON	2013
359	PRINTER LQ	EPSON	2013
360	EKSTERNAL HARDISK	TOSHIBA	2013
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
361	EKSTERNAL HARDISK	TOSHIBA	2013
362	UPS	Oki	2013
363	UPS	Oki	2013
364	UPS	Oki	2013
365	UPS	Oki	2013
366	UPS	Oki	2013
367	MONITOR	LG LED	2013
368	KAMERA DIGITAL	SONY CYBER	2013
369	KAMERA DIGITAL	SONY CYBER	2013
370	KAMERA DIGITAL	NIKON	2013
371	Kendaraan Roda Dua	Kawasaki	2013
372	Kendaraan Roda Dua	Kawasaki	2013
373	Kendaraan Roda Dua	Kawasaki	2013
374	Kendaraan Roda 4 (Empat) Kijang Innova	NEW INNOVA 2.0 M/T	2014
375	Kendaraan Roda 4 (Empat) Suzuki Ertiga	SUZUKI ERTIGA	2014
376	Kendaraan Roda 4 (Empat) Suzuki Ertiga	SUZUKI ERTIGA	2014
377	Meja Rapat Bundar	MODERA CLASS	2014

		COMFEREN	
378	Alat Pembersih Udara	SHARP	2014
379	Alat Pembersih Udara Sedang	BLUEIR	2014
380	Vacum Cleaner	KARCHER	2014
381	AC 1,5 PK		2014
382	AC 2 PK	SHARP	2014

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
383	AC STANDING	SHARP	2014
384	Kipas Angin	SEKAI IFL 1875 TC	2014
385	Speker		2014
386	Speker		2014
387	Speker		2014
388	Speker		2014
389	Mic Conference	BOSCH	2014
390	Mic Conperence	BOSCH	2014
391	Mic Conperence	BOSCH	2014
392	Mic Conperence	BOSCH	2014
393	Mic Conperence	BOSCH	2014
394	Mic Conperence	BOSCH	2014
395	Mic Conperence	BOSCH	2014
396	Mic Conperence	BOSCH	2014
397	Gordyn		2014
398	Tong Sampah		2014
399	Tong Sampah		2014
400	Tong Sampah		2014

401	Tong Sampah		2014
402	Tong Sampah		2014
403	Tong Sampah		2014
404	Tong Sampah		2014
405	Tong Sampah		2014
406	Karpet Ruangan Aula (216) Meter	FLO KAMEL	2014
407	Karpet Ruangan Musholla	DINASTY	2014
408	Karpet Ruangan Musholla	DINASTY	2014
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
409	Karpet Ruangan Musholla	DINASTY	2014
410	Karpet Ruangan Musholla	DINASTY	2014
411	Mesin Pompa Air Listrik	GRUNDFOS CHJ4-40	2014
412	Faximile	PANASONIC KX-FL512	2014
413	GPS	GARMIN	2014
414	GPS	GARMIN	2014
415	GPS	GARMIN	2014
416	GPS	GARMIN	2014
417	TENDA		2014
418	TENDA		2014
419	KOMPUTER LAPTOP	LENOVO	2014
420	KOMPUTER PC	INTEL	2014
421	KOMPUTER PC	INTEL	2014
422	KOMPUTER PC	INTEL	2014
423	KOMPUTER PC	INTEL	2014
424	KOMPUTER PC	INTEL	2014

425	KOMPUTER LAPTOP	LENOVO	2014
426	KOMPUTER LAPTOP	LENOVO	2014
427	KOMPUTER LAPTOP	LENOVO	2014
428	KOMPUTER LAPTOP	LENOVO	2014
429	KOMPUTER LAPTOP	LENOVO	2014
430	KOMPUTER LAPTOP	LENOVO	2014
431	PRINTER INKJET	EPSON L800	2014
432	PRINTER INKJET	EPSON L800	2014
433	PRINTER INKJET	EPSON L800	2014
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
434	PRINTER INKJET	EPSON L800	2014
435	PRINTER INKJET	EPSON L800	2014
436	PRINTER INKJET	EPSON L800	2014
437	PRINTER INKJET	EPSON L800	2014
438	PRINTER LASERJET	HP LASERJET PRO P1 566	2014
439	PRINTER LASERJET		2014
450	PRINTER LASERJET		2014
451	EKSTERNAL HARDISK	WD	2014
452	EKSTERNAL HARDISK	WD	2014
453	EKSTERNAL HARDISK	WD	2014
454	EKSTERNAL HARDISK	WD	2014
455	EKSTERNAL HARDISK	WD	2014
456	EKSTERNAL HARDISK	WD	2014
457	EKSTERNAL HARDISK		2014
458	EKSTERNAL HARDISK		2014
459	EKSTERNAL HARDISK		2014

460	MEJA RAPAT		2014
461	MEJA RAPAT		2014
462	MEJA RAPAT		2014
463	MEJA RAPAT		2014
464	MEJA RAPAT		2014
465	MEJA RAPAT		2014
466	KURSI PUTAR	Front Line/Lec 099	2014
467	KURSI PUTAR	Front Line/Lec 099	2014

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
468	KURSI PUTAR	Front Line/Lec 099	2014
469	KURSI PUTAR	Front Line/Lec 099	2014
470	KURSI PUTAR	Front Line/Lec 099	2014
471	KURSI PUTAR	Front Line/Lec 099	2014
472	KURSI TAMU	TITOV	2014
473	ALMARI ARSIP	GLORY ROYAL	2014
474	ALMARI ARSIP	GLORY ROYAL	2014
475	ALMARI ARSIP	GLORY ROYAL	2014
476	ALMARI ARSIP	GLORY ROYAL	2014
477	ALMARI ARSIP	GLORY ROYAL	2014
478	ALMARI ARSIP	GLORY ROYAL	2014
479	PINTU TERALIS		2014
480	LAYAR PROYEKTOR		2014

481	PROYEKTOR	PANASONIC	2014
482	KAMERA DIGITAL	CANON SX510 HS	2014
483	KAMERA DIGITAL	CANON SX510 HS	2014
484	HANDYCAM	PANASONIC HC V750	2014
485	KOMPUTER NOTE BOOK	ASSUS	2015
486	KOMPUTER NOTE BOOK	ASSUS	2015
487	KOMPUTER NOTE BOOK	ASSUS	2015
488	KOMPUTER NOTE BOOK	ASSUS	2015
489	SERVER (KOMPUTER JARINGAN)	HP PROLIANT DL380G9-687	2015
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
490	PRINTER	CANON PIXMA iX6560	2015
491	PRINTER	CANON PIXMA iX6560	2015
492	KAMERA DIGITAL	CANON	2015
493	KAMERA DIGITAL	CANON	2015
494	PROYEKTOR	EPSON EB-945	2015
495	LAYAR PROYEKTOR	EPSON EB-945	2015

Untuk mendukung kelancaran mobilitas pegawai, terutama dalam melaksanakan tugas lapangan, Bappeda Kabupaten Merangin juga didukung oleh sarana mobilitas berupa kendaraan dinas operasional. Adapun jumlah kendaraan dinas di Bappeda Kabupaten Merangin yaitu kendaraan roda 4 sebanyak 6 (Enam) unit yang terdiri dari 1 unit jenis Toyota (Kijang Innova), 2 unit Suzuki (Ertiga), 2 unit jenis Toyota (Kijang Kapsul), dan 1 unit Suzuki (Terios) dan

kendaraan roda 2 sebanyak 27 unit yang terdiri dari 27 unit jenis motor Kopling (GL, Mega Pro, Win) dan 4 unit jenis bebek. Dari kendaraan ini, penggunaannya didistribusikan kepada Bidang-bidang yang ada di Bappeda. Dengan harapan terhadap mereka yang memiliki beban kerja yang cukup, adanya kendaraan operasional akan membantu kelancaran aparatur bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan perlu didukung oleh besarnya jumlah anggaran. Adapun perkembangan alokasi Anggaran pada Bappeda Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.7
Perkembangan Anggaran Bappeda Kabupaten Merangin
Setelah Perubahan Tahun 2008-2016**

NO	TAHUN	ALOKASI ANGGARAN		JUMLAH (Rp)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	2008	1.121.986.000,-	5.704.642.500,-	6.826.628.500,-
2.	2009	1.342.668.000,-	5.382.000.400,-	6.724.668.400,-
3.	2010	1.829.594.000,-	4.596.000.000,-	6.425.594.000,-
4.	2011	1.621.666.000,-	4.083.420.000,-	5.705.086.000,-
5.	2012	2.054.056.000,-	4.352.745.000,-	6.406.801.000,-
6.	2013	2.412.750.000,-	7.897.820.350,-	10.310.570.350,-
7.	2014	3.145.775.000,-	12.343.592.300,-	15.489.284.300,-
8.	2015	3.136.929.000,-	7.741.555.842,25,-	10.878.484.842,25,-
9.	2016	3.965.117.490,06,-	6.327.320.880,-	10.292.438.289,06,-

Sedangkan persentase realisasi anggaran dan peningkatan anggaran per tahun dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.8
Realisasidan Peningkatan AnggaranBappeda Kabupaten
Merangin Tahun 2008-2016**

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI ANGGARAN (%)	PENINGKATAN ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2008	6.826.628.500,-	6.013.088.042,-	88,08	-
2.	2009	6.724.668.400,-	6.550.743934,-	97,41	(1,49)
3.	2010	6.425.594.000,-	5.684.881.990,-	88,47	(4,45)
4.	2011	5.705.086.000,-	5.559.923.430,-	97,46	(11,21)
5.	2012	6.406.801.000,-	6.283.333.207,-	98,07	12,30

6.	2013	10.310.570.350,-	10.498.398.533,-	101,82	60,93
7.	2014	15.489.284.300,-	14.191.691.308,-	91,62	50,23
8.	2015	10.878.484.842,-	10.218.960.888,25 ,-	93,93	(29,77)
9.	2016	10.292.438.289,06,-	9.902.542.590,-	96,21	(5,39)

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Merangin

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kabupaten Merangin didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam lima tahun, dari tahun 2008-2013, didapatkan capaian kinerja pelayanan yang ditampilkan dalam tabel dihalaman berikut ini.

**Tabel 2.9
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Bappeda Tahun 2008-2013**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase Capaian Realisasi
1	2	3	4	5
1	Penyusunan RKPD Tahunan 2009-2013, (dokumen)	5	5	100%
2	Pelaksanaan MUSRENBANG Kabupaten Merangin 2009-2013, (kali)	5	5	100%
3	Pelaksanaan Forum SKPD 2009-2013, (Kali)	20	20	100%
4	Penyusunan PPAS Tahun 2009-2013, (dokumen)	5	5	100%
5	Penyusunan KUA Tahun 2009-2013, (dokumen)	5	5	100%
6	Penyusunan PPAS-Perubahan Tahun 2009-2013, (dokumen)	5	5	100%
7	Penyusunan KUA-Perubahan Tahun 2009-2013, (dokumen)	5	5	100%
8	Penyusunan RTRW Kabupaten Merangin	Ada	Ada	100%
9	Penyusunan RPJMD 2008-2013	Ada	Ada	100%
10	Penyusunan Renstra SKPD 2009-2014	Ada	Ada	100%
11	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran (%)	100	100	100%
12	Jumlah sistem IT yang di gunakan untuk mendukung administrasi kantor	1	1	100%
13	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Perencanaan	4	-	-
14	Jumlah pegawai yang mengikuti	12	10	83.3%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase Capaian Realisasi
1	2	3	4	5
	Bimtek dan Diklat lainnya			
15	Tingkat Pengelolaan Anggaran, (%)	98	97	98.9 %
16	Tingkat Kesesuaian Program perencanaan pembangunan antara dokumen RPJMD, RKPD dengan Renstra SKPD, (%)	90	85	94,4%
17	Tingkat sinkronisasi dan sinergi atau kesesuaian Program antara RPJMD dengan RPJPD; (%)	90	75	83,3%
18	Tingkat kesesuaian antara Program Kegiatan Renja SKPD dan Renstra SKPD dengan KUA-PPAS (%)	90	80	88.89%
19	Jumlah rapat dan koordianasi pembangunan dgn SKPD untuk penyusunan rencana anggaran bidang	2 kali	2 kali	100%
20	Rapat Koordinasi TKPK,(kali/tahun)	2 kali	2 kali	100%
21	Jumlah rapat dan koordianasi pembangunan dgn SKPD untuk penyusunan rencana anggaran , (kali/tahun)	63 SKPD X 2	63 SKPD X 2	100%
22	Cakupan Monitoring pembangunan	Kegiatan Fisik Konstruksi	Kegiatan Fisik Konstruksi	100%
23	Tingkat penggunaan hasil evaluasi Monitoring Pembangunan untuk Perencanaan	Sebagai Dokumen	Sebagai Dokumen	100%
24	Publikasi Pencapaian MDGs Kabupaten Merangin	Belum Ada Belum Ada	Belum Ada Belum Ada	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Merangin

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda, selaku Badan Perencanaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, mempunyai peluang sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Adapun peluang yang ingin dicapai, antara lain:

1. Adanya tuntutan peningkatan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan program

- pembangunan di daerah. Ini merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan koordinasi pembangunan yang merupakan kewenangan Bappeda selaku Badan Perencanaan Pembangunan;
2. Sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Bappeda mempunyai kewenangan horisontal/koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program pembangunan di Kabupaten Merangin;
 3. Dengan makin dinamis dan kompleknya pembangunan, maka Bappeda mempunyai peluang dalam memperkuat eksistensinya selaku koordinator perencanaan pembangunan;
 4. Sebagai badan perencana yang memiliki beban kerja cukup besar dan mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan harus diawali dengan perencanaan, maka dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas/operasional Bappeda memiliki peluang untuk penyusunan peraturan-peraturan daerah yang mendukung tugas koordinasi Bappeda Kabupaten Merangin. Tugas koordinasi Bappeda yang dimaksud ialah Koordinasi pelaporan dan evaluasi penggunaan dana DAK, Dana Dekon dan Dana Tugas Pembantuan.
 5. Dengan makin beratnya tantangan dalam pelaksanaan tugas Bappeda sekarang dan masa yang akan datang. Maka, Bappeda memiliki peluang untuk meningkatkan kompetensi teknis PNS dalam bidang Analisis Perencanaan Pembangunan serta Tata Pemerintahan Yang Baik, Pengembangan Ekonomi Lokal, Perubahan Iklim (*Climate Change*), Pariwisata dan Ketahanan Pangan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas kinerja Bappeda, antara lain :

1. Kurangnya ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan pengawasan yang ketat sehingga rencana kegiatan tidak optimal.

2. Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna.
3. Efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik.
4. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Aparatur tidak optimal
5. Kurang optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk merencanakan pembangunan Kabupaten Merangin kedepan yang lebih terarah.

Untuk melihat sejauh mana tingkat persiapan dan perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, telah dilakukan evaluasi baik dalam bentuk rapat staf secara berkala maupun pertanggungjawaban laporan per semester. Melalui upaya ini, secara umum tidaklah ditemukan hambatan dan permasalahan yang sangat prinsipil dalam rangka penyelesaian kegiatan dimaksud.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra- SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Merangin yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain;

1. Kurangnya ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan pengawasan yang ketat sehingga rencana kegiatan tidak optimal.
2. Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna.
3. Efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik.
4. Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Aparatur tidak optimal

5. Kurang optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk merencanakan pembangunan Kabupaten Merangin kedepan yang lebih terarah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pemilukada, kemudian kondisi umum dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten Merangin saat ini, maka visi RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin adalah:

Visi Daerah Kabupaten Merangin adalah “ **BERBENAH** menuju **MERANGIN EMAS**”.

BANGUN EKONOMI RAKYAT: Mengartikan bahwa hal yang utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi secara efisien dan efektif.

BERSIH: Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima dan akuntabel

AMANAH: Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankann tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.

Misi Daerah Kabupaten Merangin dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Birokrasi Kepada Dengan Mengedepankan Transparansi, Efisiensi, Efektif Dan Akuntabilitas.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar.

3. Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Dan Kesehatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian dan UMKM.
5. Meningkatkan Prestasi Generasi Muda Dan Kesetaraan Gender.
6. Meningkatkan pengelolaan dan Perlindungan Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Mineral yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel parsitifatif dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas
4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
6. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas
7. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan dan kinerja BUMD

8. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah
9. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan
10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlit berprestasi
11. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah
12. Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindungan, cagar budaya tradisional melayu sebagai pusat penelitian dan, wisata alam dan budaya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018. Penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS.	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan 2. Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan daerah 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 4. Penataan sistem pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan berbasis Sistem Informasi Manajemen keuangan Daerah secara elektronik 5. Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah. 6. Peningkatan Sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik 7. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

		2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Politik	Peningkatan Masyarakat	Partisipasi	Politik
--	--	------------------------------------------------	------------------------	-------------	---------

Tabel 3.2

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS					
No	MISI	TUJUAN	SASARAN		
2	MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	1. Meningkatkan kualitas pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas jalan, jembatan dan prasarana transportasi		
			2. Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik di setiap desa secara merata		
			3. Peningkatan ketersediaan dan cakupan air bersih dan sanitasi		
			4. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pelayanan dasar/umum		
		2. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi strategis dan perumahan yang berkualitas	1. Pembangunan Irigasi terutama dikawasan sentra produksi pertanian masyarakat		
			2. Peningkatan kualitas infrastruktur pada Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)		
			3. Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu		

Tabel 3.3

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS					
No	MISI	TUJUAN	SASARAN		
3	MISI III : MENINGKATKAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompentensi	1. Meningkatkan kualitas pendidikan		
			2. Peningkatan Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja		
			3. Peningkatan Insentif untuk pegawai SARA (Imam, Balai, Khatib dan guru ngaji)		
			Meningkatnya utilitas kearsipan dan keperpustakaan bagi masyarakat luas		
		3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat		
			2. Peningkatan ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, tenaga medis, dokter umum dan dokter spesialis dengan jumlah yang memadai untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas		
		4. Terwujudnya dan pemberdayaan para penyandang masalah kesejahteraan sosial	3. Pelayanan dan perlindungan kesehatan keluarga, ibu dan anak		
			Meningkatnya Penanggulangan PMKS		

Tabel 3.4

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
4	MISI IV : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN UKM	1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Peningkatan iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan birokrasi dan penyediaan infrastruktur berdaya saing
			2. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi
			3. Peningkatan perbaikan iklim ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja
		2. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani
		3. Terwujudnya pariwisata daerah yang berdaya saing	Pengembangan dan Pengelolaan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya Kabupaten Merangin sebagai daerah wisata
		4. Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi kerakyatan	1. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah

Tabel 3.5

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
5	MISI V: MENINGKATKAN PRESTASI GENERASI MUDA DAN KESETARAAN GENDER	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan pembinaan atlet berprestasi	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas olah raga 2. Peningkatan ketersediaan atlet berbakat dan berprestasi
		2. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	1. Peningkatan pemuda berprestasi 2. Peningkatan Kesetaraan Gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak

Tabel 3.6

VISI : 'BERBENAH' (BANGUN EKONOMI RAKYAT, BERSIH DAN AMANAH) MENUJU MERANGIN EMAS			
No	MISI	TUJUAN	SASARAN
6	MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN, SDA DAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN	Meningkatkan pelestarian alam dan lingkungan hidup, khususnya penataan zona dan melestarikan kawasan hutan lindung, cagar budaya dan tradisional melayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran para stakeholder tentang pentingnya pelestarian alam dan lingkungan hidup khususnya kawasan konservasi dan perlindungan. 2. Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan dan fasilitasi pemanfaatan ruang 4. Peningkatan pemberian penghargaan kepada inisiator yang menjaga lingkungan hidup dan menerapkan sanksi secara konsisten terhadap perusak lingkungan hidup

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Sebagaimana diketahui bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis di dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Adapun Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 yaitu:
“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang Andal, Kredibel dan Proaktif Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Berbangsa dan Bernegara”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai 5 tahun ke depan, yaitu :

1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
2. Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Merangin menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah, dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah perselisihan batas wilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam Hal ini akan menjadi perhatian utama dalam menyusun Renstra Bappeda 2014-2018.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, ruang wilayah Kabupaten Merangin perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Merangin yang maju, mandiri, dan berbudaya dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Adapun kebijakan dalam penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

1. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional, hutan lindung, sempadan sungai dan mata air, dan kawasan dengan kelerengan diatas 40 (empat puluh) persen;
2. Peningkatan produktivitas potensi ekonomi wilayah dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
3. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi wilayah sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara terpadu dan ramah lingkungan;
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah dalam rangka pewujudan pelayanan wilayah; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. sistem pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

Sedangkan Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. rencana pola ruang kawasan lindung; dan
- b. rencana pola kawasan budidaya.

Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000.

Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang meliputi;

- a. perwujudan rencana struktur ruang;
- b. perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. perwujudan kawasan strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda sebagai sebuah SKPD seperti yang tercantum dalam identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD, Isu dan permasalahan Daerah juga menjadi bahan perhatian yang tak terlepas dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda ini, adapun isu-isu Strategis Bappeda yang mengacu pada sasaran RPJMD, meliputi;

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif.
2. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan.
3. Mengembangkan Perencanaan Kawasan Ekonomi.
4. Terwujudnya Perencanaan Pariwisata Daerah.
5. Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Tata Ruang.
7. Meningkatnya Perencanaan Infrastruktur Pelayanan Dasar.
8. Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah.

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi pemerintahan) menerima sukses atau mengalami

kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.

Tabel 3.7
IDENTIFIKASI ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN
INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL			
No	KEKUATAN - S	No	KELEMAHAN - W
S1	Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi	W1	Belum meratanya keahlian dan kompetensi SDM perencanaan
S2	Menyediakan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis e-Government	W2	Belum Optimalnya Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis e-Government
S3	Menyelenggarakan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	W3	Belum maksimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
FAKTOR EKSTERNAL			
No	PELUANG - O	No	ANCAMAN - T
01	Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	T1	Belum optimalnya kemampuan Aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah
02	Perkembangan teknologi	T2	Penggunaan teknologi informasi oleh aparatur belum optimal
03	Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan	T3	Masih adanya dokumen perencanaan yang ego sektoral dan kurang bersinergi

1. Penetapan Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan besarnya TNB tiap faktor dapat dipilih faktor yang memiliki TNB paling besar sebagai Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) organisasi atau unit kerja dalam mencapai misi. FKK itu merupakan faktor-faktor strategis. Dari tiap kategori strengths, weaknesses, oppurtunities and threats masing-masing dipilih 2 FKK berdasarkan urutan TNB. Cara menentukan FKK dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- a. FKK dipilih dari nilai TNB terbesar.
- b. Bila nilai TNB sama, pilih nilai NBD terbesar.
- c. Bila nilai NBD sama, pilih nilai NBK terbesar.
- d. Bila nilai NBK sama, pilih nilai BF terbesar.
- e. Bila nilai masih sama, maka pilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasional.

Adapun dua kekuatan terpilih dari masing-masing faktor dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 3.8
FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN - S	NO	KELEMAHAN - W
1	Menyelenggarakan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	Belum maksimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2	Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi	2	Belum meratanya keahlian dan kompetensi SDM perencanaan
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG - O	NO	ANCAMAN - T
1	Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan	1	Masih adanya dokumen perencanaan yang ego sektoral dan kurang bersinergi
2	Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Belum optimalnya kemampuan Aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah

2. Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni :

a. Strategi ekspansi dirumuskan pada kuadran I.

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

b. Strategi diversifikasi dirumuskan pada kuadran II.

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

c. Strategi stabilitas / rasionalisasi dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi defensif / survival dapat dirumuskan pada kuadran IV.

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival,

efisiensi yang menyeluruh atau penciutan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut :

**Tabel 3.9
FORMULASI STRATEGI SWOT**

<p><u>KAFI :</u> Kesimpulan Analisis Faktor Internal</p> <p><u>KAFE :</u> Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal</p>	<p><u>STRENGTH</u></p> <p>1. Menyelenggarakan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada pencapaian visi - misi.</p>	<p><u>WEAKNESS</u></p> <p>1. Belum maksimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>2. Belum meratanya keahlian dan kompetensi SDM perencanaan.</p>
<p><u>OPPORTUNITIES</u></p> <p>1. Komitmen SKPD lain untuk melaksanakan perencanaan.</p> <p>2. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.</p>	<p><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></p> <p>1. Penyusunan dokumen perencanaan. dan Penyusunan database perencanaan.</p> <p>2. Profesionalisme dan kreatifitas SDM.</p>	<p><u>ASUMSI STRATEGI W-O</u></p> <p>1. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM.</p>
<p><u>THREAT</u></p> <p>1. Masih adanya dokumen perencanaan yang ego sektoral dan kurang bersinergi.</p> <p>2. Belum optimalnya kemampuan Aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah.</p>	<p><u>ASUMSI STRATEGI S-T</u></p> <p>1. Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>2. Meningkatkan kesempatan Aparatur dalam mengikuti Bintek dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p><u>ASUMSI STRATEGI W-T</u></p> <p>1. Koordinasi dan melibatkan aparatur antar instansi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>2. Menciptakan pemerataan SDM perencanaan.</p>

Dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada selama ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan utama Bappeda Kabupaten

Merangin dalam menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya yaitu :

1. Belum maksimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum meratanya keahlian dan kompetensi SDM perencanaan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Merangin

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Bappeda Adapun Visi Bappeda adalah :

“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DALAM RANGKA MENDUKUNG MERANGIN EMAS 2018 ”

Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, Bappeda juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Bappeda sebagai institusi pemerintah yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan daerah, secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan nasional (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan Visi Bappeda Tahun 2014 – 2018 di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Adapun Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah;

1. Meningkatkan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Misi ini menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah dan mampu mensinergikan semua perencanaan pembangunan lintas fungsi, bidang, kawasan, lintas unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Mewujudkan sinergitas perencanaan melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat. Dalam proses pembangunan daerah, diperlukan kegiatan koordinasi monitoring

dan evaluasi kegiatan proses pembangunan daerah secara bersama-sama, sehingga ke depannya dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Merangin

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan Perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Dalam menyusun Renstra Bappeda Kabupaten Merangin mengacu pada Tujuan 1 dari misi 1 RPJMD Kabupaten Merangin. Adapun Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Merangin adalah :

Tabel 4.1
TUJUAN BAPPEDA UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Terpadu	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan

Tabel 4.2
SASARAN BAPPEDA UNTUK MENCAPAI TUJUAN

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif	1. Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD 2. Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD 3. Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra
		2. Meningkatkan Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	Persentase Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses
		3. Meningkatkan Kemampuan Pegawai di Bidang Perencanaan	Persentase Aparatur Perencana yang mengikuti Pelatihan

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
2	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	1. Meningkatkan Implementasi SPIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/Inspektorat
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda

**Tabel 4.3
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				1	2	3	4	5	
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif dan Aplikatif	1. Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD	65%	70%	75%	80%	95%	
			2. Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RKPD	65%	70%	75%	80%	95%	
			3. Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	65%	70%	75%	80%	95%	
1		2. Meningkatkan Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	Persentase Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	30%	50%	65%	75%	80%	
			3. Meningkatkan Kemampuan Pegawai di Bidang Perencanaan	Persentase Aparatur Perencana yang mengikuti Pelatihan	25%	28%	31%	36%	40%
2	Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	1. Meningkatkan Implementasi SPIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	C	CC	B	BB	BB	

4.3. Penetapan Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

**Tabel 4.4
STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RKPDP Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Menyelenggarakan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dalam program/kegiatan pembangunan
2.	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	Persentase Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	Peningkatan Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis e-government	Meningingkatkan Penyediaan Informasi e-government
3.	Peningkatan Kapasitas SDM Perencana	Meningkatnya Kemampuan Pegawai di Bidang Perencanaan	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Menyediakan kesempatan bagi Aparatur Perencana untuk mengikuti Pelatihan dan BinteK.

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
4.	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/Inspektorat	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Tertib Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Temuan
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Bapeda	Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel	Menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sesuai dengan Ketentuan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Bappeda Kabupaten Merangin sebagai badan perencana mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan. Bappeda Kabupaten Merangin berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Merangin selama kurun waktu lima tahun disajikan dalam matriks tabel 5.1 berikut ini;

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA 2014 - 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan	Lokasi	
					Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013						Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018				
					Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target				Rp.
					volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD	60	%	1.678.909.400,00	65	%	2.679.290.700,00	70	%	1.839.916.100,00	75	%	1.365.993.600,00	80	%	1.139.887.900,00	95	%	2.353.668.700,00	95	%	9.378.757.000,00			
		Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	60	%		65	%		70	%		75	%		80	%		95	%		95	%				
		Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	60	%		65	%		70	%		75	%		80	%		95	%		95	%				
		Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersusunnya Dokumen RPJMD 2019-2023	0	dokumen	Rp.0.00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	450.039.500,00	1	dokumen	450.039.500,00	Bappeda Kab. Merangin		
		Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah	Dokumen RKPd	1	dokumen	Rp.85.500.200,00	2	dokumen	186.599.400,00	2	dokumen	175.554.800,00	1	dokumen	118.819.000,00	2	dokumen	174.743.500,00	2	dokumen	210.718.500,00	9	dokumen	866.435.200,00	Bappeda Kab. Merangin		
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Terselenggaranya musrenbang RKPd tepat waktu	1	Kali	Rp.166.310.200,00	1	Kali	252.387.700,00	1	Kali	280.426.100,00	1	Kali	98.083.300,00	1	Kali	174.388.800,00	1	Kali	184.218.800,00	5	Kali	989.504.700,00	Bappeda Kab. Merangin		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung	Dokumen LKPI	2	dokumen	Rp.213.523.300,00	2	dokumen	124.114.400,00	2	dokumen	83.251.000,00	2	dokumen	80.550.750,00	2	dokumen	81.305.800,00	2	dokumen	110.012.000,00	10	dokumen	479.233.950,00	Bappeda Kab. Merangin		
		Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Frekwensi pelaksanaan Monev	2	Kali	Rp.286.194.100,00	2	Kali	255.555.900,00	2	Kali	169.099.500,00	2	Kali	96.539.500,00	0	Kali	0	0	Kali	0	6	Kali	521.194.900,00	Bappeda Kab. Merangin		
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Dokumen KUA dan PPAS	2	dokumen	Rp.34.746.700,00	2	dokumen	48.947.700,00	2	dokumen	41.998.900,00	2	dokumen	38.369.300,00	2	dokumen	49.339.300,00	2	dokumen	85.899.500,00	10	dokumen	264.554.700,00	Bappeda Kab. Merangin				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		Lokasi					
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target		Rp.									
					Target		Target		Target		Target		Target		Target			Rp.								
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan										
			Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan	Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	2	dokumen	Rp.34.736.200,00	2	dokumen	46.379.700,00	2	dokumen	42.228.300,00	2	dokumen	39.955.100,00	2	dokumen	51.680.100,00	2	dokumen	84.367.500,00	10	dokumen	264.610.700,00	Bappeda Kab. Merangin
			Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dana Tugas Perbantuan dan Alokasi Khusus	Laporan Monev dana TP dan Alokasi Khusus	1	dokumen	Rp.76.823.900,00	1	dokumen	102.349.400,00	1	dokumen	87.221.000,00	1	dokumen	31.411.000,00	0	dokumen	0	1	dokumen	150.000.000,00	3	dokumen	370.981.400,00	Bappeda Kab. Merangin
			Koordinasi program Samisake	Frekwensi koordinasi dan monitoring Program samisake	2	Kali	Rp.215.794.000,00	2	Kali	228.936.700,00	2	Kali	301.460.700,00	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	4	Kali	530.397.400,00	Bappeda Kab. Merangin
			Asistensi Program dan Kegiatan RKA SKPD dan Evaluasi APBD/P	Frekwensi pelaksanaan asistensi	2	Kali	Rp.95.929.600,00	2	Kali	173.807.300,00	2	Kali	72.726.300,00	2	Kali	37.489.300,00	0	Kali	0	0	Kali	0	6	Kali	284.022.900,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pendampingan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang didampingi	24	Kecamatan	Rp.32.979.500,00	24	Kecamatan	40.561.500,00	24	Kecamatan	34.639.500,00	24	Kecamatan	24.071.500,00	24	Kecamatan	39.231.500,00	24	Kecamatan	40.415.000,00	24	Kecamatan	178.919.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen Evaluasi RKPD	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	1	dokumen	113.693.500,00	1	dokumen	54.121.000,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	2	dokumen	167.814.500,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Merangin	Peraturan Bupati tentang IKU dan Perjanjian Kinerja	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	2	dokumen	31.794.100,00	2	dokumen	24.939.100,00	2	dokumen	37.764.100,00	2	dokumen	40.530.000,00	8	dokumen	135.027.300,00	Bappeda Kab. Merangin
			Review RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 2018	Dokumen Revisi RPJMD	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	300.626.700,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	300.626.700,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin	Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	99.072.600,00	0	dokumen	0	1	dokumen	99.072.600,00	Bappeda Kab. Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			Lokasi	
					Tahun 2014		Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target		Rp.					
					Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target							
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan		volume	satuan			
			Penyusunan IKU dan PK OPD	dokumen iku dan PK OPD	0	Dokumen	Rp.0.00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	2	Dokumen	10.902.600,00	2	Dokumen	18.980.000,00	4	Dokumen	29.882.600,00	Bappeda Kab. Merangin
			penyusunan RPJMD kabupaten Merangin 2014-2018	dokumen RPJMD	1	Dokumen	Rp.385,728,000,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Bappeda Kab. Merangin
			penyusunan Renstra Bappeda 2014-2018	dokumen renstra	1	Dokumen	Rp.19,332,000.00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Bappeda Kab. Merangin
			penyusunan restra bappeda 2019-2023	dokumen renstra	0	Dokumen	Rp.0.00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	31.890.000,00	1	Dokumen	31.890.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengendalian	Frekwensi koordinasi bidang penelitian	0	Kali	Rp.0.00	16	Kali	120.033.800,00	17	Kali	113.755.500,00	12	Kali	43.515.250,00	0	Kali	0	0	Kali	0	45	Kali	277.304.550,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengendalian dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	frekwensi pengendalian dan evaluasi	0	kali	Rp.0.00	0	kali	0	0	kali	0	4	kali	84.415.000,00	4	kali	84.971.000,00	8	kali	169.386.000,00	8	kali	169.386.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengendalian dan evaluasi perencanaan OPD bidang sosial budaya dan adm pemerintahan	frekwensi pengendalian dan evaluasi	0	kali	Rp.0.00	0	kali	0	0	kali	0	8	kali	41.069.500,00	8	kali	72.335.000,00	16	kali	113.404.500,00	16	kali	113.404.500,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan kab.merangin	terbangunnya dan terselenggaranya sistem informasi perencanaan pembangunan	0	sistem informasi	Rp.0.00	0	sistem informasi	0	3	sistem informasi	229.498.000,00	3	sistem informasi	184.886.600,00	3	sistem informasi	173.861.600,00	3	sistem informasi	212.197.800,00	12	sistem informasi	800.444.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pelaksanaan forum OPD bidang prasarana wilayah	jumlah dokumen perencanaan yg disusun	0	Dokumen	Rp.0.00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	60.000.000,00	1	Dokumen	60.000.000,00	2	Dokumen	120.000.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pelaksanaan forum SKPD bidang infrastruktur	jumlah dokumen perencanaan yg disusun	1	Dokumen	Rp.31,311,700.00	1	Dokumen	37.382.200,00	1	Dokumen	53.291.200,00	1	Dokumen	32.816.200,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	3	Dokumen	123.489.600,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengendalian dan evaluasi perencanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan	frekwensi pengendalian dan evaluasi	0	kali	Rp.0.00	0	kali	0	0	kali	0	4	kali	24.496.500,00	4	kali	28.345.000,00	8	kali	52.841.500,00	8	kali	52.841.500,00	Bappeda Kab. Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			Lokasi			
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target		Rp.								
					Target		Target		Target		Target		Target		Target			Rp.							
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan									
		Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra																						
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4	Kali	Rp.158.171.200,00	4	Kali	128.004.800,00	4	Kali	69.309.800,00	12	Kali	68.682.000,00	5	Kali	147.100.000,00	5	Kali	149.345.000,00	30	Kali	562.441.600,00	Bappeda Kab. Merangin
		Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1	dokumen	Rp.40.205.000,00	1	dokumen	50.107.000,00	1	dokumen	42.914.000,00	1	dokumen	42.464.000,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	3	dokumen	135.485.000,00	Bappeda Kab. Merangin
		Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Merangin	laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1	dokumen	Rp.227.093.700,00	1	dokumen	186.404.000,00	1	dokumen	149.122.200,00	1	dokumen	107.479.000,00	1	dokumen	223.119.100,00	1	dokumen	300.780.000,00	5	dokumen	966.904.300,00	Bappeda Kab. Merangin
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (REPIDA) Kabupaten Merangin	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	224.718.000,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	224.718.000,00	Bappeda Kab. Merangin
		Penyusunan kebutuhan investasi dengan pendekatan icor	Dokumen rencana kebutuhan investasi dengan pendekatan icor	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	1	dokumen	225.000.000,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	225.000.000,00	Bappeda Kab. Merangin
		Penyusunan studi pengembangan pemasaran komoditi pertanian	Dokumen Masterplan Pengembangan Pemasaran komoditi pertanian	0	dokumen	Rp.0,00	1	dokumen	216.006.400,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	216.006.400,00	Bappeda Kab. Merangin
		Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Terpadu	Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Terpadu	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	1	dokumen	229.498.000,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	229.498.000,00	Bappeda Kab. Merangin
		Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	226.280.000,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	226.280.000,00	Bappeda Kab. Merangin
		Fasilitasi Replanting Sawit Kabupaten Merangin	Frekuensi fasilitas replanting sawit Kab. Merangin	4	Kali	Rp.66.567.800,00	4	Kali	116.363.800,00	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	8	Kali	116.363.800,00	Bappeda Kab. Merangin
		Pemuktahiran Database Kemiskinan Kabupaten Merangin	Jumlah Dokumen Database Kemiskinan	1	Dokumen	Rp.82.599.500,00	1	Dokumen	360.938.300,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	360.938.300,00	Bappeda Kab. Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			Lokasi				
					Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target		Rp.							
					Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.						
					volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan								
			Pelaksanaan Forum OPD Bidang Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	0	Dokumen	Rp.0.00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	60.000.000,00	1	Dokumen	62.885.000,00	2	Dokumen	122.885.000,00	Bappeda Kab. Merangin			
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra																									
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan Budaya	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	8	Kali	Rp.284.576.750,00	8	Kali	292.857.200,00	8	Kali	202.010.200,00	8	Kali	102.621.500,00	10	Kali	280.513.000,00	10	Kali	468.687.500,00	44	Kali	1.346.689.400,00	Bappeda Kab. Merangin			
			Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1	dokumen	Rp.47.234.000,00	1	dokumen	49.486.400,00	1	dokumen	44.095.400,00	1	dokumen	47.776.500,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	3	dokumen	141.358.300,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1	dokumen	Rp.49.760.400,00	1	dokumen	55.755.600,00	1	dokumen	50.955.600,00	1	dokumen	54.118.500,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	3	dokumen	160.829.700,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Rumah Sakit Kabupaten Merangin	Dokumen Masterplan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah	0	dokumen	Rp.0.00	1	dokumen	351.393.400,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	351.393.400,00	Bappeda Kab. Merangin
			Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program Merangin sehat dan Merangin Pintar	Frekwensi koordinasi dan pemantauan Program	0	Kali	Rp.0.00	12	Kali	134.489.400,00	12	Kali	60.407.200,00	12	Kali	34.774.000,00	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	36	Kali	229.670.600,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Laporan dan Pencapaian Kinerja RAD MDGs Kabupaten Merangin	Tersusunnya Kinerja RAD MDGs Kabupaten Merangin	0	Dokumen	Rp.0.00	3	Dokumen	69.661.300,00	3	Dokumen	49.521.300,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	6	Dokumen	119.182.600,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Masterplan Segmen Paleobotani Park Kabupaten Merangin	Masterplan Paleobotani Park	0	dokumen	Rp.0.00	1	dokumen	576.616.400,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	576.616.400,00	Bappeda Kab. Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		Lokasi			
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target		Rp.	Target		Rp.						
					Target		Target		Target		Target		Target		Target			Target								
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan		volume	satuan							
			Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1	Dokumen	Rp.13.451.300,00	1	Dokumen	12.389.400,00	1	Dokumen	10.467.400,00	1	Dokumen	9.966.200,00	3	Dokumen	9.191.200,00	3	Dokumen	19.850.000,00	9	Dokumen	61.864.200,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun	4	Dokumen	Rp.29.288.300,00	4	Dokumen	30.105.000,00	4	Dokumen	27.427.700,00	4	Dokumen	39.328.300,00	4	Dokumen	39.667.500,00	4	Dokumen	40.125.600,00	20	Dokumen	176.654.100,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Program perencanaan pengembangan kota-kota Menengah dan Besar	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra																						
			Koordinasi perencanaan air minum dan kesehatan lingkungan	Frekuensi koordinasi bidang air minum dan kesehatan lingkungan	0	Kali	Rp.0,00	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	8	Kali	166.135.000,00	8	Kali	170.100.800,00	16	Kali	336.235.800,00	Bappeda Kab. Merangin
			Koordinasi Perencanaan Air minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Terkoordinasi nya Pelaksanaan Pamsimas	0	Kali	Rp.0,00	6	Kali	101.092.400,00	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	6	Kali	101.092.400,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Anlikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	70	%	0,00	74,45	%	0,00	78,60	%	0,00	82,35	%	68.422.200,00	85,75	%	0,00	90,01	%	0,00	90,01	%	68.422.200,00	
			Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Merangin	Jumlah dokumen Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Merangin	0	Dokumen	Rp.0,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	68.422.200,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	68.422.200,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Anlikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Regulasi Daerah Urusan Perencanaan yang ditetapkan	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	33.673.000,00	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	97.500.000,00	2	Dokumen	131.173.000,00	
			Penataan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah naskah akademik yang disusun	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	33.673.000,00	0	dokumen	0	1	dokumen	97.500.000,00	2	dokumen	131.173.000,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Anlikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat	Program Pengembangan kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Dokumen Perencanaan Kawasan Ekonomi	1	Dokumen	378.812.000,00	1	Dokumen	383.116.200,00	1	Dokumen	716.147.800,00	1	Dokumen	61.367.000,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	3	Dokumen	1.160.631.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		Lokasi		
					Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Target		Rp.				
					Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	Target			Rp.			
					volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan		volume	satuan					
		Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase	Koordinasi PNPM Kabupaten Merangin	dokumen PNPM PISEW	1	Dokumen	Rp.249.935.000,00	1	Dokumen	225.224.800,00	1	Dokumen	192.960.800,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	2	Dokumen	418.185.600,00	Bappeda Kab. Merangin
			Koordinasi Pelaksanaan PROPEMAS Kabupaten Merangin	dokumen pelaksanaan propemas	1	Dokumen	Rp.128.877.000,00	1	Dokumen	157.891.400,00	1	Dokumen	75.567.000,00	1	Dokumen	61.367.000,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	3	Dokumen	294.825.400,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Perencanaan penetapan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	Jumlah Dokumen pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh yang disusun	0	Dokumen	Rp.0,00	0	Dokumen	0	1	Dokumen	447.620.000,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	447.620.000,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Anlikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatkan Perencanaan Pariwisata Daerah	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	147.052.600,00	1	Dokumen	239.558.000,00	1	Dokumen	189.384.500,00	1	Dokumen	236.920.000,00	4	Dokumen	812.915.100,00	
			Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Geopark Merangin	Terselenggaranya Koordinasi Pengembangan Geopark Merangin	0	Kali	Rp.0,00	0	Kali	0	8	Kali	147.052.600,00	12	Kali	239.558.000,00	10	Kali	189.384.500,00	10	Kali	236.920.000,00	40	Kali	812.915.100,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Anlikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase Fasilitas Perencanaan Bidang Pertanian	50,23	%	0,00	49,91	%	0,00	49,54	%	34.835.000,00	49,4	%	0,00	49,3	%	0,00	49,2	%	0,00	49,2	%	34.835.000,00	
			Fasilitasi Replanting Sawit Kabupaten Merangin	Frekuensi fasilitas replanting sawit Kab. Merangin	0	Kali	Rp.0,00	0	Kali	0	4	Kali	34.835.000,00	0	Kali	0	0	Kali	0	0	Kali	0	4	Kali	34.835.000,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Anlikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat	Program Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Rendah Emisi	Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Emisi	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	132.292.400,00	1	Dokumen	157.032.100,00	1	Dokumen	37.869.000,00	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	175.000.000,00	4	Dokumen	502.193.500,00	
			Koordinasi pembangunan rendah emisi	Penurunan emisi rata-rata berbasis lahan (TON CO2 Eq/tahun)	0	Kali	Rp.0,00	10	Kali	132.292.400,00	10	Kali	157.032.100,00	4	Kali	37.869.000,00	0	Kali	0	12	Kali	175.000.000,00	36	Kali	502.193.500,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Anlikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat	Program pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Jumlah Dokumen Penataan Ruang	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	95.009.400,00	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	49.535.500,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	2	Dokumen	144.544.900,00	
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Laporan BKPRD yang disusun	0	Dokumen	Rp.0,00	1	Dokumen	95.009.400,00	0	Dokumen	0	1	Dokumen	49.535.500,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	2	Dokumen	144.544.900,00	Bappeda Kab. Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		Lokasi					
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target		Rp.									
					Target		Target		Target		Target		Target		Target			Rp.								
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan										
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Program perencanaan tata ruang	Jumlah Dokumen informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten Merangin berserta rencana rinciannya	1	Dokumen	170.468.100,00	1	Dokumen	235.908.400,00	1	Dokumen	134.674.000,00	1	Dokumen	46.635.000,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	3	Dokumen	417.217.400,00	
			Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Frekwensi Koordinasi Rencana Tata Ruang	20	Kali	Rp.170.468.100,00	20	Kali	235.908.400,00	12	Kali	134.674.000,00	12	Kali	46.635.000,00	0	Kali	0	0	Kali	0	44	Kali	417.217.400,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Meningkatnya Frekuensi Perencanaan Pelayanan Air Minum dan Sistem Air Limbah	0	kali	0,00	0	kali	0,00	4	Kali	181.543.500,00	12	Kali	322.109.600,00	0	Kali	0,00	0	Kali	0,00	16	Kali	503.653.100,00	
			Koordinasi pansimas	Frekwensi koordinasi dan monitoring Program Pamsimas	0	Kali	Rp.0,00	0	Kali	0	4	Kali	132.384.500,00	12	Kali	322.109.600,00	0	Kali	0	0	Kali	0	16	Kali	454.494.100,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Kebijakan Strategi daerah sistem pengembangan air minum (JAKDASPAM)	Dokumen Penyusunan JAKDASPAM yang disusun	0	Dokumen	Rp.0,00	0	Dokumen	0	3	Dokumen	49.159.000,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	3	Dokumen	49.159.000,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan	Terlaksananya Pendataan Sejarah Kepurbakalaan Kab. Merangin	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	117.995.700,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	117.995.700,00	
			Koordinasi Pelacakan Peninggalan Kepurbakalaan Kabupaten Merangin	Frekwensi Koordinasi pelacakan peninggalan kepurbakalaan	0	kali	Rp.0,00	8	kali	117.995.700,00	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	0	kali	0	8	kali	117.995.700,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan RKKPD terhadap RPJMD Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	Program peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Persentase Tenaga kerja perempuan dibidang Formal	1	%	0,00	1	%	0,00	4	%	105.685.800,00	8	%	0,00	10	%	0,00	15	%	0,00	15	%	105.685.800,00	
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Merangin Tahun 2013 - 2017	Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)	0	Dokumen	Rp.0,00	0	Dokumen	0	1	Dokumen	105.685.800,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	105.685.800,00	Bappeda Kab. Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		Lokasi					
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target		Rp.									
					Target		Target		Target		Target		Target		Target			Rp.								
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan										
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif	Meningkatnya Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	Persentase Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	Program Pengembangan data dan informasi	Persentase Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	15	%	206.922.800,00	30	%	257.954.400,00	50	%	202.306.500,00	65	%	143.316.000,00	75	%	86.932.600,00	80	%	93.687.000,00	80	%	784.196.500,00	
			358 Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	0	dokumen	Rp.0,00	0	dokumen	0	1	dokumen	95.654.500,00	1	dokumen	57.289.000,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	2	dokumen	152.943.500,00	Bappeda Kab. Merangin
			361 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dokumen Laporan HUT Kabupaten Merangin	3	dokumen	Rp.57.962.200,00	3	dokumen	93.442.000,00	4	dokumen	106.652.000,00	4	dokumen	86.027.000,00	4	dokumen	86.932.600,00	4	dokumen	93.687.000,00	19	dokumen	466.740.600,00	Bappeda Kab. Merangin
			Koordinasi dan publikasi data statistik daerah	Tersedianya Publikasi Data Statistik Daerah	2	Dokumen	Rp.148.960.600,00	2	Dokumen	164.512.400,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	2	Dokumen	164.512.400,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aspiratif dan Aplikatif	Meningkatnya Kemampuan Pegawai di Bidang Perencanaan	Persentase Aparatur Perencana yang mengikuti Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase Aparatur Perencana yang mengikuti Pelatihan	20	%	151.590.000,00	25	%	179.100.000,00	28	%	152.050.000,00	31	%	103.832.000,00	36	%	75.565.000,00	40	%	219.080.000,00	40	%	729.627.000,00	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	7	Orang	Rp.60.800.000,00	7	Orang	70.350.000,00	6	Orang	56.850.000,00	6	Orang	30.990.000,00	3	Orang	31.390.000,00	6	Orang	70.280.000,00	28	Orang	259.860.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Personil yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5	Orang	Rp.29.990.000,00	5	Orang	27.700.000,00	6	Orang	38.350.000,00	5	Orang	11.742.000,00	5	Orang	12.150.000,00	5	Orang	60.000.000,00	26	Orang	149.942.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Teknis Fungsional	7	Orang	Rp.60.800.000,00	9	Orang	81.050.000,00	6	Orang	56.850.000,00	7	Orang	61.100.000,00	3	Orang	32.025.000,00	5	Orang	88.800.000,00	30	Orang	319.825.000,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat	90	%	0,00	100	%	15.350.000,00	100	%	18.065.000,00	100	%	18.127.000,00	100	%	9.877.000,00	100	%	10.864.700,00	100	%	72.283.700,00	
			Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Dokumen Standar Penilaian SPIP	0	dokumen	Rp.0,00	1	dokumen	15.350.000,00	1	dokumen	18.065.000,00	1	dokumen	18.127.000,00	1	dokumen	9.877.000,00	1	dokumen	10.864.700,00	5	dokumen	72.283.700,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	C		75.480.900,00	C		92.389.700,00	CC		84.781.100,00	B		106.241.500,00	BB		102.391.600,00	BB		120.795.000,00	BB		506.598.900,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan			Lokasi				
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target		Rp.	Target		Rp.						
					Target		Target		Target		Target		Target		Target			Target								
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan		volume	satuan							
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	1	Dokumen	Rp.6.268.000,00	1	Dokumen	8.312.100,00	1	Dokumen	7.311.700,00	1	Dokumen	8.706.900,00	1	Dokumen	12.984.500,00	1	Dokumen	26.745.000,00	5	Dokumen	64.060.200,00	Bappeda Kab. Merangin
			penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	0	Dokumen	Rp.0,00	0	Dokumen	0	3	Dokumen	30.069.400,00	3	Dokumen	46.769.600,00	1	Dokumen	19.967.100,00	1	Dokumen	21.667.000,00	8	Dokumen	118.473.100,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD	Jumlah dokumen Laporan Aset SKPD yang disusun	1	dokumen	Rp.39.850.600,00	1	dokumen	53.345.000,00	1	dokumen	47.400.000,00	1	dokumen	50.765.000,00	2	dokumen	44.220.000,00	2	dokumen	46.413.000,00	7	dokumen	242.143.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun	0	Dokumen	Rp.0,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	12.660.000,00	1	Dokumen	12.980.000,00	2	Dokumen	25.640.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	0	Dokumen	Rp.0,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	12.560.000,00	1	Dokumen	12.990.000,00	2	Dokumen	25.550.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyusunan laporan keuangan BAPPEDA	Jumlah laporan keuangan	3	Dokumen	Rp.29.362.300,00	3	Dokumen	30.732.600,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	3	Dokumen	30.732.600,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	75	%	1.070.798.000,00	75	%	2.161.886.000,00	80	%	1.452.311.000,00	85	%	864.560.000,00	90	%	432.544.000,00	90	%	1.828.810.000,00	90	%	6.740.111.000,00	
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	0	Unit	Rp.0,00	1	Unit	148.975.000,00	1	Unit	616.675.000,00	0	Unit	0	0	Unit	0	2	Unit	230.000.000,00	3	Unit	995.650.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang diadakan	1	Unit	Rp.310.750.000,00	1	Unit	307.250.000,00	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	1	Unit	385.000.000,00	2	Unit	692.250.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yang diadakan	3	Unit	Rp.75.000.000,00	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	2	Unit	65.000.000,00	2	Unit	65.000.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	6	Unit	Rp.49.000.000,00	21	Unit	449.975.000,00	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	2	Unit	31.100.000,00	23	Unit	481.075.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	2	Unit	Rp.9.000.000,00	4	Unit	30.875.000,00	0	Unit	0	6	Unit	37.500.000,00	0	Unit	0	6	Unit	80.300.000,00	11	Unit	148.675.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengadaan meubeler	Jumlah Meubeler yang diadakan	9	Unit	Rp.22.250.000,00	119	Unit	202.000.000,00	1	Unit	12.500.000,00	7	Unit	40.000.000,00	0	Unit	0	5	Unit	171.300.000,00	130	Unit	425.800.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengadaan komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	24	Unit	Rp.110.950.000,00	25	Unit	208.225.000,00	4	Unit	234.225.000,00	4	Unit	103.750.000,00	2	Unit	16.000.000,00	9	Unit	82.100.000,00	39	Unit	644.300.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi yang disediakan	7	Unit	Rp.72.000.000,00	14	Unit	88.750.000,00	2	Unit	87.375.000,00	2	Unit	31.500.000,00	0	Unit	0	5	Unit	70.060.000,00	20	Unit	277.685.000,00	Bappeda Kab. Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		Lokasi			
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target		Rp.									
					Target		Target		Target		Target		Target		Target			Target								
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan		volume	satuan							
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1	Unit	Rp.40.000.000,00	2	Unit	53.500.000,00	3	Unit	169.000.000,00	3	Unit	104.000.000,00	3	Unit	86.000.000,00	3	Unit	148.000.000,00	15	Unit	560.500.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	27	Unit	Rp.170.100.000,00	29	Unit	121.100.000,00	29	Unit	98.600.000,00	29	Unit	46.500.000,00	27	Unit	41.500.000,00	27	Unit	58.950.000,00	141	Unit	366.650.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang direhab	0	Unit	Rp.0,00	3	Unit	250.850.000,00	1	Unit	112.000.000,00	2	Unit	324.400.000,00	1	Unit	195.400.000,00	5	Unit	378.000.000,00	12	Unit	1.260.650.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	122	unit	Rp.73.498.000,00	124	unit	139.386.000,00	126	unit	99.436.000,00	140	unit	114.410.000,00	98	unit	74.144.000,00	100	unit	85.000.000,00	588	unit	512.376.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	Unit	Rp.138.250.000,00	7	Unit	161.000.000,00	2	Unit	22.500.000,00	5	Unit	62.500.000,00	12	Unit	19.500.000,00	13	Unit	44.000.000,00	39	Unit	309.500.000,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	75	%	29.250.000,00	75	%	91.800.000,00	80	%	61.200.000,00	85	%	70.200.000,00	90	%	73.800.000,00	90	%	81.180.000,00	90	%	378.180.000,00	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan	65	Stel	Rp.29.250.000,00	68	Stel	30.600.000,00	68	Stel	34.000.000,00	76	Stel	39.000.000,00	82	Stel	41.000.000,00	90	Stel	45.100.000,00	384	Stel	189.700.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus yang disediakan	0	Stel	Rp.0,00	68	Stel	61.200.000,00	68	Stel	27.200.000,00	76	Stel	31.200.000,00	82	Stel	32.800.000,00	90	Stel	36.080.000,00	384	Stel	188.480.000,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	90	%	1.085.974.800,00	91	%	1.364.499.900,00	92	%	1.247.190.800,00	93	%	2.441.216.800,00	94	%	1.581.228.600,00	95	%	2.364.146.000,00	95	%	8.998.282.100,00	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen, surat yang terselesaikan	2600	surat	Rp.3.510.000,00	2500	surat	1.750.000,00	2300	surat	1.250.000,00	2100	surat	1.350.000,00	2000	surat	500.000,00	2000	surat	4.000.000,00	10900	surat	8.850.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	Rp.106.200.000,00	12	bulan	121.200.000,00	12	bulan	139.200.000,00	12	bulan	237.700.000,00	12	bulan	313.800.000,00	12	bulan	496.800.000,00	12	bulan	1.308.700.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya	28	unit	Rp.6.800.000,00	31	unit	15.700.000,00	33	unit	20.850.000,00	33	unit	18.500.000,00	32	unit	16.700.000,00	32	unit	19.500.000,00	161	unit	91.250.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	Rp.129.900.000,00	12	bulan	137.700.000,00	12	bulan	171.900.000,00	12	bulan	119.700.000,00	12	bulan	144.300.000,00	12	bulan	162.900.000,00	60	bulan	736.500.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	12	bulan	Rp.13.412.400,00	12	bulan	18.069.500,00	12	bulan	26.978.000,00	12	bulan	29.043.900,00	12	bulan	20.000.000,00	12	bulan	30.000.000,00	12	bulan	124.091.400,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	19	orang	Rp.177.200.000,00	18	orang	192.800.000,00	21	orang	169.116.000,00	27	orang	277.200.000,00	33	orang	371.760.000,00	29	orang	371.600.000,00	128	orang	1.382.476.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	Rp.95.746.700,00	12	bulan	102.978.800,00	12	bulan	102.076.900,00	12	bulan	106.011.900,00	12	bulan	98.581.100,00	12	bulan	150.000.000,00	12	bulan	559.648.700,00	Bappeda Kab. Merangin

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2013		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan		Lokasi					
					Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target		Rp.							
					Target		Target		Target		Target		Target		Target		Target									
					volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan	volume	satuan								
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	15	jenis	Rp.36.821.000,00	16	jenis	51.676.700,00	18	jenis	68.459.800,00	22	jenis	68.084.800,00	13	jenis	44.067.800,00	15	jenis	50.789.000,00	83	jenis	283.078.100,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen intalisasi listrik yang diadakan	17	jenis	Rp.15.349.700,00	21	jenis	23.007.400,00	21	jenis	83.425.100,00	22	jenis	40.318.300,00	21	jenis	33.359.700,00	22	jenis	39.567.000,00	107	jenis	219.677.500,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang undangan yang diadakan	26	media massa	Rp.48.650.000,00	26	media massa	48.650.000,00	32	media massa	58.650.000,00	33	media massa	58.990.000,00	33	media massa	60.000.000,00	33	media massa	71.240.000,00	157	media massa	297.530.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien /tamu	12	bulan	Rp.88.625.000,00	12	bulan	104.037.500,00	12	bulan	101.040.000,00	12	bulan	105.640.000,00	12	bulan	100.390.000,00	12	bulan	150.000.000,00	12	bulan	561.107.500,00	Bappeda Kab. Merangin
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	prekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan	92	kali	Rp.346.030.000,00	128	kali	501.490.000,00	70	kali	288.950.000,00	180	kali	1.164.892.900,00	80	kali	362.845.000,00	92	kali	577.000.000,00	550	kali	2.895.177.900,00	Bappeda Kab. Merangin
			Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	42	kali	Rp.17.730.000,00	46	kali	45.440.000,00	15	kali	15.295.000,00	100	kali	213.785.000,00	50	kali	14.925.000,00	22	kali	30.000.000,00	233	kali	319.445.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengelolaan arsip OPD	Jumlah Dokumen arsip yang dipelihara	0	Dokumen	Rp.0,00	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	10080	Dokumen	115.500.000,00	10080	Dokumen	115.500.000,00	Bappeda Kab. Merangin
			Pengelolaan perpustakaan OPD	Jumlah kunjungan perpustakaan OPD	0	Orang/Tahun	Rp.0,00	0	Orang/Tahun	0	0	Orang/Tahun	0	0	Orang/Tahun	0	0	Orang/Tahun	0	120	Orang/Tahun	95.250.000,00	120	Orang/Tahun	95.250.000,00	Bappeda Kab. Merangin
Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Urusan Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	29.926.350,00	1	Kali	44.324.000,00	1	Kali	48.292.155,00	1	Kali	39.724.000,00	1	Kali	34.986.500,00	1	Kali	34.900.000,00	5	Kali	202.226.655,00	
			Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan	1	Kali	Rp.29.926.350,00	1	Kali	44.324.000,00	1	Kali	48.292.155,00	1	Kali	39.724.000,00	1	Kali	34.986.500,00	1	Kali	34.900.000,00	5	Kali	202.226.655,00	Bappeda Kab. Merangin

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018

6.1 Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Merangin

Indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1;

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode)
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD	60%	65%	70%	75%	80%	95%	95%
2	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	60%	65%	70%	75%	80%	95%	95%
3	Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	60%	65%	70%	75%	80%	95%	95%
4	Persentase Ketersediaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mudah diakses	15%	30%	50%	65%	75%	80%	80%
5	Persentase Aparatur Perencana yang mengikuti Pelatihan	20%	25%	28%	31%	36%	40%	40%
6	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan oleh BPK/ Inspektorat	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda	C	C	CC	B	BB	BB	BB

6.2 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Merangin

Dari beberapa Indikator kinerja Bappeda tersebut, yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Merangin dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda 2014-2018**

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD	60%	65%	70%	75%	80%	95%	95%
		2. Persentase Tingkat Keselarasan RKPd terhadap RPJMD	60%	65%	70%	75%	80%	95%	95%
		3. Persentase Tingkat Keselarasan Renja terhadap Renstra	60%	65%	70%	75%	80%	95%	95%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Merangin periode 2014-2018, maka terdapat beberapa program yang menjadi prioritas Bappeda Kabupaten Merangin;

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3. Program Perencanaan Sosial Budaya
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
5. Program Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Insfrastruktur

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

BAB VII PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan RENSTRA Bappeda Kabupaten Merangin guna memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018, maka dengan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi Bappeda Kabupaten Merangin beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menjadi pelaksana pencapaian target-target visi misi RPJMD 2014-2018.

Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Merangin untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, rasional, implementatif, sinergis dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MERANGIN**



H. DEDI DAR MANTIAS, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680918 199503 1 001